

ABSTRAK

Penulisan Legal Memorandum ini berdasarkan Laporan Informasi nomor : R/LI-81/XII/Paminal tanggal 13 Desember 2019 tentang viralnya video pemukulan yang diduga dilakukan oleh anggota Polri. Pada dua video tersebut tampak seseorang yang diduga anggota Polri melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan dengan benda tumpul (tongkat), tendangan, pukulan tangan kosong pada bagian wajah, punggung, dan bagian tangan korban yang diduga warga Tamansari atau anggota kelompok solidaritas warga. Permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan legal memorandum ini adalah, bagaimanakah tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Dalmas pada pengamanan penertiban kawasan Tamansari menurut KUHP dan Tindakan hukum lain apakah yang dapat dilakukan Paminal Polda Jawa Barat terhadap pelaku kekerasan pada pengamanan penertiban kawasan Tamansari Bandung.

Metode penulisan menggunakan pendekatan hukum normative, yaitu mengacu pada studi kepustakaan yang ada. Dalam penulisan ini juga dipergunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dimana pendekatan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan kasus hukum yang sedang diteliti.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat dikemukakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Dalmas pada pengamanan penertiban kawasan Tamansari menurut KUHP pada dasarnya dapat memenuhi rumusan Pasal 170 ayat (2) ke 1 dan atau Pasal 351 ayat (1) KUHP Agar proses hukum terhadap pelaku penganiayaan tersebut dapat dilakukan masih diperlukan adanya pelaporan atau pengaduan dari korban kekerasan yang disertai bukti-bukti berupa akibat yang ditimbulkan yang ditimbulkan dari penganiayaan tersebut. Berkaitan dengan tindakan hukum yang dapat dilakukan Sub Paminal Bid Propam Polda Jabar adalah antara lain dengan mengembalikan anggota yang melakukan kekerasan kepada atasannya atau ankum.

Abstract

This Legal Memorandum is based on Information Report No: R / LI-81 / XII // Paminal on 13 December 2019 regarding the viral video of violences committed by members of Police. In the two videos, it appears that someone suspected of being a member of Police committed acts of violences that were allegedly residents of Tamansari or members of the community solidarity group. Legal issues raised in the writing of this legal memorandum are, how do acts of violence perpetrated by Dalmas members in securing the arrangement of the Tamansari area according to the Criminal Code and what other legal actions can be carried out by West Java Regional Police for the perpetrators of violence in securing the arrangement of the Tamansari area in Bandung.

This writing method is using normative law research that relies on the existing literature study. In this study also use the legislation approach (statute approach), where the approach is done by examining the laws and regulations relevant to the case that are being investigated,

The results of this paper can be summarized as follows, the acts of violence by police members in securing the arrangement city of the Tamansari area according to the Criminal Code can basically fulfill the formulation of Article 170 paragraph (2) to 1 and or Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code In order that legal proceedings against the perpetrators of the persecution can still be required reporting or complaints from victims of violence accompanied by evidence in the form of the consequences arising from the persecution. Related to legal actions that can be implemented by Sub bid Propam, by returning members who committed violence to their commander.